

| PENURUNAN PMA GLOBAL |

NEGARA BERKEMBANG PALING TERIMBAS

Bisnis, JAKARTA — Aliran investasi langsung asing ke negara-negara berkembang diperkirakan menyusut paling tajam akibat pandemi Covid-19. Padahal, sejumlah negara itu selama ini sangat bergantung pada penanaman modal asing.

Reni Lestari
reni.lestari@bisnis.com

Badan PBB untuk Urusan Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dalam *World Investment Report 2020* memproyeksi investasi langsung asing (FDI) akan anjlok 40% tahun ini menjadi hanya US\$920 miliar—US\$1,1 triliun.

Negara-negara berkembang mengalami kemerosotan penanaman modal asing (PMA) lebih parah ketimbang negara-negara maju. Di negara-negara berkembang Asia, PMA diperkirakan turun 30%—45%. Lalu di Afrika, investasi asing diprediksi berkurang 30%—45%. Adapun di Amerika Latin dan Karibia, investasi asing diramal jatuh 40%—55%.

Di kawasan lain yang relatif maju, kontraksi PMA diperkirakan lebih landai, yakni 25%—40% di Eropa dan 20%—35% di Amerika Utara.

Gejala penurunan PMA di Asia terlihat dari beberapa indikasi awal, yakni pelemahan nilai investasi kuartal 1/2020 hingga 37% dan

penyusutan jumlah merger dan akuisisi 35% pada April 2020.

UNCTAD mencatat total arus masuk PMA ke negara berkembang Asia pada 2019 mencapai US\$473 miliar, turun 4,9% dari realisasi tahun sebelumnya. Nilai itu berkontribusi 30,8% terhadap PMA global. China berhasil menarik masuk PMA US\$141,2 miliar tahun lalu atau tumbuh 2,1%, Singapura US\$92,1 miliar (15,5%), India US\$50,6 miliar (19,9%), Hong Kong US\$68,4 miliar (-34,4%), dan Indonesia US\$23,4 miliar (13,9%).

“Negara-negara berkembang diperkirakan akan melihat penurunan terbesar dalam FDI karena mereka lebih bergantung pada investasi di industri-industri intensif dan rantai pasokan ekstraktif yang telah sangat terpukul,” kata Direktur Investasi dan Perusahaan UNCTAD James Zhan dalam *World Investment Report 2020*, dikutip Minggu (27/7).

UNCTAD menyebutkan langkah-langkah pembatasan pergerakan

yang serempak dilakukan banyak negara berkontribusi besar pada perlambatan proyek investasi. Prospek resesi yang mendalam juga menyebabkan perusahaan multinasional meninjau ulang proyek-proyek baru.

Selain itu, selama krisis ini, beberapa negara juga menerapkan kebijakan pembatasan pada investasi baru. Kanada misalnya, pada April merilis kebijakan pengetatan PMA bagi perusahaan kesehatan dan yang terlibat rantai pasok barang dan jasa penting dengan dalih melindungi industri dalam negeri.

Di Amerika Serikat, pembatasan tersebut sudah diberlakukan sebelum pandemi, berupa pengetahuan PMA pada teknologi penting, termasuk alat kesehatan dan bioteknologi.

Adapun indikator awal pukulan mendalam terhadap PMA global a.l. revisi target pendapatan perusahaan multinasional. Sebanyak 5.000 perusahaan multinasional teratas dunia merevisi proyeksi

pendapatan. Industri jasa, terutama akomodasi dan layanan makanan, terkena dampak paling parah dengan pemangkasan proyeksi pendapatan hingga 94%, diikuti industri transportasi dan perdagangan 63%, industri komoditas 70%, dan manufaktur 50%.

Selain itu, pengumuman proyek investasi baru hanya 1.064 pada Maret 2020 atau turun 51% dari periode yang sama tahun lalu. Volume merger dan akuisisi lintas batas turun 52% (*year on year*) menjadi 435 pada April 2020. Dalam pembiayaan proyek global, kesepakatan baru juga turun lebih dari 40%.

RANTAI PASOK

Ekonom dan Manager Praktik Bank Dunia Christine Zhenwei Qiang bersama sejumlah rekannya menyarankan tiga respons kebijakan bagi negara berkembang dalam fase pemulihan rantai pasok global dan arus investasi.

Pertama, menyiapkan pembukaan ekonomi pada awal pascakrisis. Guna menarik investasi, negara-negara dapat melawan arus

proteksionisme global dengan semakin mengurangi pembatasan PMA operasional sebagai bagian dari reformasi struktural. Menjadi lebih terbuka bagi investor asing dapat secara signifikan membantu menarik investasi.

Kedua, memanfaatkan peluang dari pergeseran rantai pasok global. Tuntutan diversifikasi rantai pasok semakin menguat setelah pandemi, juga didorong perang dagang antara AS dengan China.

“Jika peluang investasi baru muncul, ini akan memerlukan prioritas baru dalam kebijakan investasi dan reformasi promosi,” katanya.

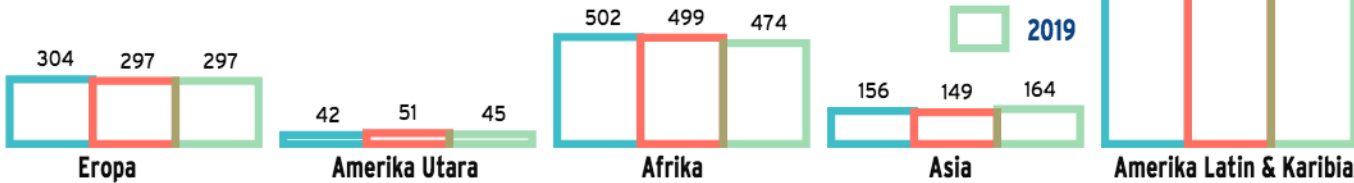
Ketiga, memperkuat kerja sama global. Pandemi telah menyoroti pentingnya pertukaran data dan informasi serta penguatan kolaborasi. Sejarah baru-baru ini menunjukkan integrasi global melalui perdagangan dan investasi telah membawa perdamaian dan kemakmuran bagi banyak negara. Para pemimpin global perlu bekerja bersama untuk mendulang manfaat dari rantai pasok global. ■

INVESTASI ‘TERINFEKSI’



Pandemi virus corona menyumbat sebagian aliran investasi asing langsung (FDI) secara global. Dampaknya terasa segera hingga jangka panjang. Seketika terjadi perlambatan pengerjaan proyek yang sedang berlangsung, diikuti dengan penundaan belanja modal (capex), lalu penurunan merger dan akuisisi lintas batas, hingga divestasi dan pengalihan bisnis ke negara lain.

Perkembangan Nilai FDI Global (US\$ juta)



Proyeksi 2020

Eropa	240 - 300
Amerika Utara	190 - 240
Afrika	25 - 35
Asia	260 - 330
Amerika Latin & Karibia	70 - 100
Global	920 - 1.080

Sumber: UNCTAD

BISNIS/YAYAN INDRAYANA

GOODYEAR

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOODYEAR INDONESIA TBK (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang diadukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) Perseroan (selanjutnya RUPST dan RUPS LB secara bersama-sama disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari dan tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020
- Tempat : Ruang Rafflesia 1-3, Hotel Santika Bogor, Jalan Raya Padjajaran Botani Square, Bogor.
- Waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai

Mata Acara RUPST:

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pertimbangan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan atas rencana Perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan. Terkait dengan mata acara ke empat, Perseroan akan membahas mengenai Persetujuan atas rencana Perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara RUPS LB:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Buku Lapangan Industri (KBLI) 2017 dan penyesuaian pasal-pasal tertentu Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan Mata Acara:

Untuk memenuhi ketentuan KBLI 2017 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Industri dan Peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengimpor undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juli 2020 yang diterbitkan KSEI.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No. 15/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyerahkan kepada Pemegang Saham untuk menggunakan kebijakannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Asl surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Etik (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Bina Registrasi yang beralamat di Satrio Tower, lantai 5, Jl. Prof. Dr. Seto, RT.7/RW.2, Kuningan, Jakarta 12951, Indonesia dan dapat menghubungi melalui telepon 021-25884818.
 - b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASYKSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa waktu yang sahnamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASYKSEI (<https://gasyksei.co.id>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
3. Bahan-bahan rapat dapat diunduh secara langsung di situs Perseroan www.goodyear-indonesia.com sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali mengimbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan Surat Kuasa. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan dan memenuhi prosedur kesehatan yang diterapkan pengelola Gedung atau fasilitas setempat sesuai dengan arahan prosedur kesehatan dan Protokol Pemerintah dalam rangka penerapan pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk tidak terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menengkapi dan menandatangani Form Covid-19 Precaution System Investigation yang dapat diunduh di situs Perseroan dan mengimprimkannya kepada Perseroan pada hari 14 Agustus 2020 melalui email: corona@goodyear.co.id
 - b) Menepatkan physical distancing, peserta Rapat wajib membawa dan memakai hand sanitizer dan membawa kepada Para Pemegang Saham serta peserta Rapat untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain apapun tidak saling bersentuhan secara langsung;
 - c) Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai;
 - d) Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan pengukuran suhu badan sebelum memasuki ruang rapat yang telah disediakan oleh Perseroan dan pengelola Gedung;
 - e) Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat;
 - f) Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, masker, hand sanitizer, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Bogor, 27 Juli 2020
PT Goodyear Indonesia Tbk
Direksi

CERITA DUBES

Berbagi Tanggung Jawab saat Pandemi

Reni Lestari
reni.lestari@bisnis.com

Pertengahan Januari 2020, Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi menggelar makan siang bersama Menteri Kesehatan Korsel Park Neung-hoo. Saat itu, kasus Covid-19 pertama di Korea Selatan belum terkonfirmasi, tetapi tes PCR sudah mulai digalakkan sejak 3 Januari 2020. Kepada Park, Umar menanyakan kesiapan negara itu menghadapi pandemi mengingat jarak geografis yang dekat dan hubungan dagang yang erat dengan China.

Menkes Park menjawab sistem kesehatan Korsel sudah berpengalaman menangani wabah SARS dan MERS sebelumnya sehingga penanganan dapat dijalankan dengan maksimal. Selang 5 hari kemudian atau pada 20 Januari 2020, barulah negara itu mencatat kasus pertama dan menjadi negara di luar China yang paling awal terkena wabah.

Umar mengatakan, hal yang patut dicermati dari sikap masyarakat Korsel adalah protokol kesehatan menjadi bagian dari tanggung jawab yang dipikul warga dalam penanganan pandemi.

Sejak kasus pertama terkonfirmasi hingga 17 Februari, penambahan kasus harian cukup terkendali pada angka hitungan jari. Namun pada 18 Februari, seorang pasien Covid-19 yang ke-31 di Korsel menjadi *superspreader* yang menyebarkan

virus ke puluhan ribu jemaat agama di salah satu gereja di Daegu, kota metropolitan terbesar keempat setelah Seoul, Busan, dan Incheon.

“Pada 29 Februari, terjadi puncak penambahan kasus hingga kira-kira 1.000 dalam satu hari, tetapi sejak itu bisa terus ditekan,” kata Umar saat berbincang secara *live* di akun Instagram *Bisnis.com*, Rabu (22/7).

Selain itu, yang menarik dari penanganan pandemi di Negeri Ginseng adalah keputusan pemerintah menerapkan 3T ketimbang *lockdown*. *Pertama, testing*. Hingga kini, lanjut Umar, sekitar 1,6 juta warga Korsel telah menjalani tes PCR dari total jumlah penduduk sekitar 51 juta jiwa.

Kedua, tracing atau pelacakan virus. Dengan infrastruktur dan teknologi, Korsel termasuk yang paling dipuji dunia karena kemampuan pelacakan. Dari akumulasi sekitar 14.000 kasus, 76% di antaranya diketahui dari hasil *tracing*, sedangkan 15% kasus impor, dan 9% sisanya masih diselidiki.

Ketiga, treatment atau perawatan kesehatan bagi pasien Covid-19. Infrastruktur kesehatan Korsel mampu menyembuhkan 91% dari total kasus. Per Minggu (26/7),



Umar Hadi

total kasus mencapai 14.150 dengan angka kesembuhan 12.890 dan total warga meninggal 298.

Hal lain yang tak kalah penting adalah kesiapan infrastruktur yang prima dan koherensi kebijakan pemerintah.

Sementara itu, di sektor ekonomi, Korsel yang sangat menggantungkan pendapatan dari perdagangan internasional,

kini dinyatakan resesi secara teknis setelah kontraksi dua kuartal berturut-turut.

Pemerintah setempat telah menggelontorkan stimulus ekonomi senilai total US\$230 miliar, termasuk untuk bantuan tunai kepada 6 juta warga miskin. Menghadapi perlambatan ekonomi, Korsel kini gencar menjaring potensi domestik. Bantuan tunai yang diberikan dimaksudkan untuk mendorong permintaan sehingga produksi bisa kembali bergulir.

Umar mengatakan kini kegiatan ekonomi dan rutinitas di negara itu berlangsung normal dengan adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan.

“Di Seoul tetap ramai, macet, *meeting* masih berjalan, kalau ke restoran juga cukup penuh, tetapi ada kebiasaan-kebiasaan baru, seperti masker selalu dipakai dan isi absen dulu.”